

## DINAMIKA KESEJAHTERAAN DALAM PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### *THE DYNAMIC OF WELFARE IN THE ECONOMY OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE*

**M. Irwan<sup>1\*</sup>, Busaini<sup>2</sup>, St. Maryam<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Jalan Majapahit No.62, Mataram, Indonesia

\*Email Penulis korespondensi: [dae-Irwan@unram.ac.id](mailto:dae-Irwan@unram.ac.id)

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dinamika kesejahteraan dalam perekonomian Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang menggambarkan dinamika kesejahteraan perekonomian Nusa Tenggara Barat tahun 2012- 2023. Data yang dipergunakan data sekunder. Analisis menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan kondisi data yang dilakukan dengan menggunakan tabel dan grafik, berkaitan dengan dinamika kesejahteraan yang dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kesejahteraan ekonomi dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan inflasi terjadi dinamika berfluktuatif. Secara Rata-rata IPM 67.45 dengan kriteria "Sedang", pertumbuhan ekonomi 3.86 persen, kategori belum berkualitas, tingkat inflasi 3,95 persen dengan kriteria ringan. Aspek kesejahteraan masyarakat dengan indikator tingkat kemiskinan rata-rata 15,35 persen tergolong tinggi, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,08 persen tergolong sedang. Berdasarkan rata-rata variable baik dalam Indikator kesejahteraan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat, menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam perekonomian masih berada dalam kondisi yang relative terbatas.

Kata-Kata Kunci: Dinamika, kesejahteraan, inflasi, pertumbuhan, kemiskinan

#### ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the dynamics of welfare in the economy of West Nusa Tenggara. The research employs a descriptive approach to depict the welfare dynamics of West Nusa Tenggara's economy during the period 2012–2023. The study uses secondary data. Analysis is conducted descriptively by presenting data conditions using tables and graphs, focusing on welfare dynamics viewed from Economic Growth, Inflation, Poverty Rate, Human Development Index (HDI), and Open Unemployment Rate (OUR). The study results indicate that economic welfare aspects, measured by the Human Development Index (HDI), economic growth, and inflation, fluctuated throughout the study period. On average, the HDI was 67.45, categorized as "Moderate," economic growth reached 3.86 percent, which is considered low, and inflation was 3.95 percent, classified as mild. Meanwhile, social welfare aspects showed an average poverty rate of 15.35 percent, considered high, while the Open Unemployment Rate (OUR) was 4.08 percent, categorized as moderate. Based on the average values of both economic and social welfare indicators, it can be concluded that overall welfare in West Nusa Tenggara remains relatively limited.

Keywords: Dynamics, welfare, inflation, growth, poverty

#### PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan salah satu indikator yang menjadi tujuan dari pembangunan ekonomi baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini salah satunya terlihat dari cita-cita pembangunan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Prisciawati, 2023). Kesejahteraan merupakan kondisi dimana terpenuhi kebutuhan manusia dari kebutuhan yang bersifat paling dasar seperti makan, minum dan pakaian hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat (Defianti et al., 2021). Kesejahteraan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan

apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diindikasikan ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak (Sultan et al., 2023).

Menurut Kuncoro (2010); Subandi (2019), indikator pembangunan terdiri dari indikator ekonomi dan indikator social. Indikator ekonomi dapat dilihat dari beberapa variable antara lain pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan New Economic Welfare (NEW) atau Kesejahteraan Ekonomi Bersih. Sedangkan indikator social dapat antara lain dapat dilihat dari variable Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan maupun ketimpangan pengeluaran penduduk maupun pengangguran. Kesejahteraan dapat diindikasikan ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak. Pembangunan tidak hanya terfokus pada pemerintah pusat, namun sebahagian besar harus berada di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Menurut Sun'an & Senuk (2015), bahwa ada 3 katagori besar dalam pembangunan daerah yaitu pembangunan sosia; pembangunan perekonomian dan pembangunan lingkungan hidup. Tiga katagori ini disebut dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Fenomena umum yang dapat diteropong dalam proses pembangunan nasional maupun di provinsi Nusa Tenggara Barat adalah masih belum stabilnya kondisi kesejahteraan masyarakat. Indikator yang dapat dilihat adalah besarnya nilai IPM yang telah dicapai oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data BPS NTB, nilai IPM NTB pada tahun 2013 sebesar 63,76 berada pada katagori sedang mengalami peningkatan menjadi 69.46 pada tahun 2022 dan masih berada dalam katagori sedang. Artinya selama kurun waktu 10 tahun meskipun terjadi perubahan IPM yang meningkat mencapai 5,70 point lebih tinggi dari capaian nasional, namun kualitas sumber daya manusia masih tetap berada pada kondisi yang stagnan.

Menurut (Beik & Arsyianti, 2016), salah satu indikator untuk menilai kualitas Sumber Daya Insani di suatu negara adalah dengan menggunakan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan melalui Usia Harapan Hidup dan Indeks Daya Beli yang didekati dengan pendapatan per kapita. IPM merupakan salah satu indikator penentu kesejahteraan sebuah bangsa maupun daerah. Kesejahteraan dapat diindikaasikan ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tigtat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak (Sultan et al., 2023).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indikator kesejahteraan mengacu pada dua aspek yaitu (1) aspek pengembangan dan pemerataan ekonomi yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi; Indeks Gini; (2) aspek kesejahteraan masyarakat, terdiri dari jumlah dan tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Bappeda NTB, 2021b). Proses pembangunan yang tengah telah tengah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat pada priode yang berbeda juga memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya (sumber daya manusia) baik secara individu maupun berkelompok. Guna mewujudkan tujuan tersebut telah disusun program kerja yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, untuk menyongsong hadirnya Indonesia Emas pada tahun 2045. Hakikat pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan manusia dan masyarakat seutuhnya, dan harus mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia ke arah yang lebih baik dilihat dari berbagai dimensi (Irwan et al., 2022). Sumber daya manusia merupakan

pelaku utama ekonomi yang memanfaatkan sumber daya lainnya, yang merupakan salah satu factor pendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indicator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditunjukkan oleh perubahan output nasional (Pulakian et al., 2021). Rinaldi et al., (2022) mengutip pendapat Alfarabi, dkk (2014) yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi juga diyakini memberikan dampak pada pergeseran struktur ekonomi.

Hasil Penelitian (Firmansyah et al., 2024) menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengalami perubahan signifikan dalam struktur ekonominya selama beberapa dekade terakhir. Hal ini terlihat dari menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB dan naiknya sektor Industri pengolahan mengalami peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap total PDRB. Variabel lain yang menjadi indikator kesejahteraan ekonomi adalah Inflasi. Inflasi merupakan suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Sementara laju inflasi adalah tingkat perubahan harga secara umum untuk berbagai jenis produk dalam rentang waktu tertentu (Murni, 2013). Kemiskinan merupakan salah satu variabel indikator dalam kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Rendahnya kehidupan yang sering menjadi masalah dalam suatu propinsi sehingga dapat menimbulkan sebuah rantai kemiskinan (Pangiuk, 2018). Secara umum kemiskinan terdiri dari kemiskinan relatif, yaitu konsep yang penilaian/pengukurannya ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat atau pemerintah berdasarkan garis kemiskinan. Kemiskinan absolut yaitu penilaian/pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan, tetapi oleh standar kehidupan minimum yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (manakan dan non-makanan) (Tambunan, 2022).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ringkasan ukuran pembangunan manusia dari sisi yang lebih luas (Maipita, 2014). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian perkembangan non fisik suatu daerah dalam jangka panjang yang terukur pada tiga aspek penting: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak (Bappeda NTB, 2021a). Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: 1. umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); 2. pengetahuan (knowledge); dan 3. standar hidup layak (decent standard of living) (Shobri et al., 2022).

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam katagori angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Sumarsono, 2009). Pengangguran akan menjadi beban dan penghambat dan beban pertumbuhan perekonomian, pengangguran juga. Digunakan menjadi salah satu infikator dari pasar kerja yang ada (Soleh, 2017). Salah satu jenis pengangguran adalah Pengangguran terbuka (*open unemployment*) yaitu orang yang benar-benar sedang tidak bekerja, baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Pengangguran terbuka tercipta akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja (Sukirno, 2013).

Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mencerminkan kesejahteraan penduduk pada saat tersebut, karena kebanyakan penganggur tidak memiliki pendapatan yang tetap sehingga berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pula pada kesejahteraannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

(Sitepu et al., 2024) menunjukkan bahwa Pengangguran dapat menyebabkan penurunan konsumsi karena pengurangan pendapatan rumah tangga, yang pada gilirannya dapat mengurangi belanja konsumen. Dampak sosial dari pengangguran dapat sangat merugikan masyarakat Indonesia, menyebabkan tekanan ekonomi dan psikologis bagi mereka yang terkena dampaknya. Implementasi kebijakan dan program pemerintah penting dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mendukung taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dinamika kesejahteraan dalam indikator ekonomi relevan untuk dianalisis, untuk mengetahui kinerja yang telah diraih oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat. Dinamika kesejahteraan yang terjadi akan menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan berkesinambungan baik untuk masa sekarang maupun untuk masa mendatang. Sebagaimana yang diuraikan di atas, banyak variabel yang mempengaruhi kesejahteraan Berkenaan dengan hal itu rumusan permasalahannya adalah Bagaimana dinamika kesejahteraan dalam Perekonomian Nusa Tenggara Barat Tujuan yang ingin dicapai dalam analisis ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan dinamika kesejahteraan dalam perekonomian Nusa Tenggara Barat.

## METODE PENELITIAN

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang Dinamika Modal Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat dilihat dari berbagai dimensi dan indikator yang dianalisis.

### **Jenis Dan Sumber Data**

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang bersumber dan berbagai instansi yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Instansi tersebut seperti BPS NTB, Bappeda NTB, dan berbagai literature dan informasi yang berkaitan dengan analisis penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui Analisis deskriptif yaitu menggambarkan kondisi data yang dilakukan dengan menggunakan tabel dan grafik, berkaitan dengan dinamika kesejahteraan yang dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Dinamika Kesejahteraan**

Kesejahteraan yang dibahas mengacu pada aspek kesejahteraan yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Aspek Pengembangan dan Pemerataan ekonomi dan aspek Kesejahteraan Masyarakat.

### **Aspek Pengembangan dan Pemerataan Ekonomi**

Berkenaan dengan kesejahteraan perekonomian dari aspek pemerataan ekonomi, yang dianalisis dalam bagian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

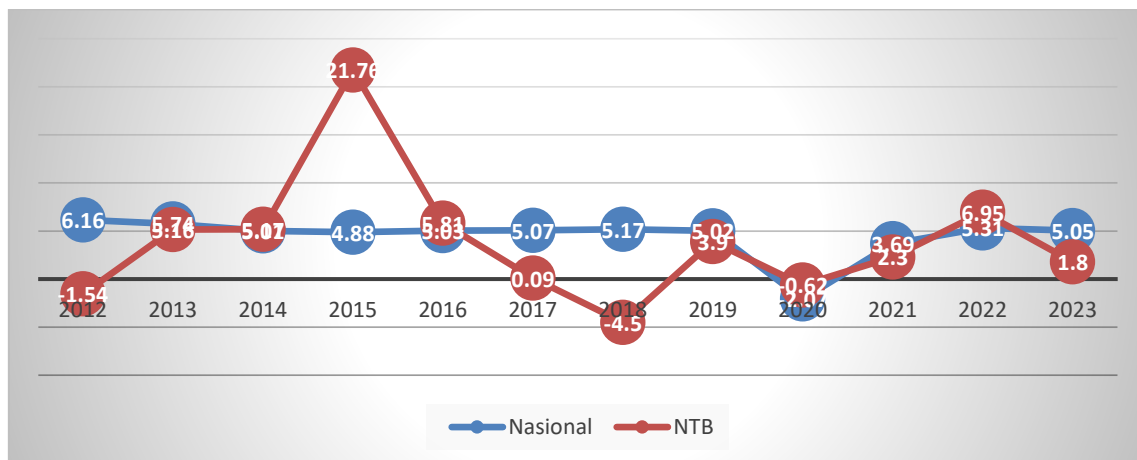
### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan kinerja perekonomian suatu negara atau daerah sekaligus mengukur kesejahteraan penduduknya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau

daerah maka semakin baik kinerja perekonomian negara atau daerah tersebut yang mencerminkan keadaan penduduk yang ada semakin mendekati sejahtera.

Pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2012- 2023 mengalami dinamika yang tidak stabil, artinya pada tahun tertentu mengalami peningkatan yang cukup tajam, dan pada tahun yang lainnya mengalami penurunan yang signifikan. Terjadinya dinamika yang demikian tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang dicerminkan oleh besarnya PDRB yang diterima oleh setiap sektor ekonomi per tahun yang juga mengalami pergerakan naik dan turun.

Pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami pergerakan yang cukup signifikan terutama yang terjadi pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, dapat dikatakan bahwa perekonomian Nusa Tenggara Barat mengalami booming, karena nilai PDRB yang diperoleh terutama dari sektor tambang mengalami peningkatan yang sangat tajam. Hal tersebut terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 1. Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012- 2023 (%)

Dinamika pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat setelah tahun 2015 tidak secerah tahun sebelumnya dan terus mengalami penurunan hingga mencapai negatif pada tahun 2018 sementara pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama justru sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 5.17 persen mengalami kenaikan sebesar 0.10 persen dibanding tahun 2016 sebesar 5.07 persen. Perekonomian Nusa Tenggara Barat yang mengandalkan sektor pertambangan tidak memberikan jaminan bahwa perekonomian tetap dalam kondisi baik dan stabil. Terjadi penurunan jumlah produksi sektor tambang pada tiga tahun terakhir menjadi pemicu menurunnya pertumbuhan ekonomi ditambah lagi penerimaan dari sektor-sektor lainnya yang juga mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat kembali bergeliat pada tahun 2019 dengan mengalami pertumbuhan sebesar 3,90 persen. Perekonomian Nusa Tenggara Barat yang tengah menuju pemulihan kembali setelah dilanda gempa bumi pada tahun 2018, menyebabkan beberapa infrastruktur yang menunjang distribusi barang dan jasa mengalami kerusakan. Tahun 2020 merupakan tahun tidak bersahabat bagi perekonomian dunia. Pandemi Covid-19 yang melanda telah merusak tata perekonomian yang tengah dibangun. Aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dibatasi gerakannya. Dampaknya siklus barang dan jasa tidak berjalan stabil yang bermuara menurunnya penerimaan dari berbagai sektor ekonomi yang berada dalam PDRB NTB. Turunnya nilai

PDRB tahun 2020 otomatis menurunkan pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai pertumbuhan yang negatif baik untuk provinsi maupun nasional.

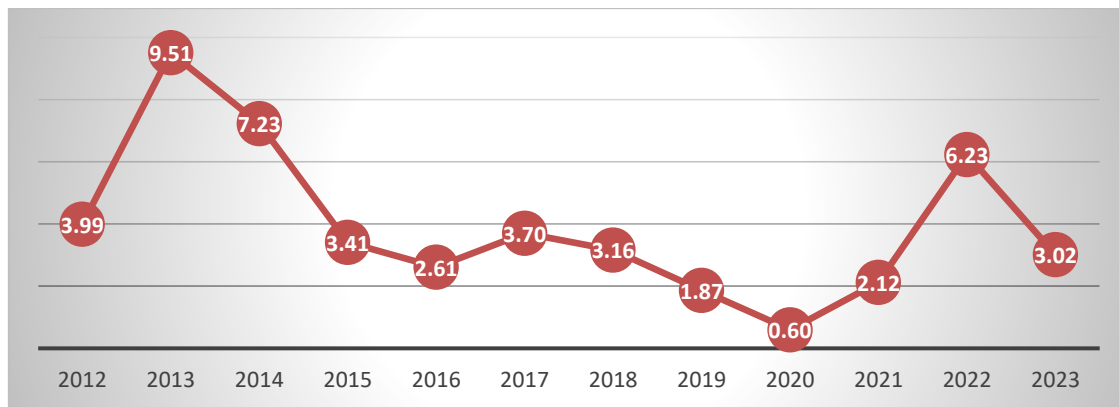
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 baik secara regional (provinsi NTB) maupun nasional kembali meningkat meskipun belum mencapai besaran yang ditargetkan. Penanganan pandemi Covid-19 masih terus dilanjutkan dan gairah aktivitas ekonomi kembali bangkit meskipun belum sepenuhnya pulih dan stabil. Pertumbuhan ekonomi telah kembali menjadi positif meski besarnya masih lebih rendah dari besarnya pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 meningkat positif dan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Pandemi covid-19 yang semakin mereda telah mendorong para pelaku ekonomi semakin menggiatkan aktivitasnya yang beraneka ragam. Pertumbuhan ekonomi pada tahun ini adalah sebesar 6.95 persen berada pada kategori pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mampu mencapai 5,31 persen. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada tahun 2022 tidak mampu dipertahankan pada tahun 2023 bahkan mengalami penurunan yang cukup tajam dengan besaran 1,8 persen dan jauh lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.05 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini menempatkan provinsi NTB termasuk 10 provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena pemerintah NTB masih menempatkan sektor tambang sebagai penyumbang yang terbesar terhadap PDRB setelah sektor pertanian. Menurunnya produksi tambang selama beberapa bulan otomatis tidak terjadi ekspor sehingga menyebabkan penerimaan nilai tambah sektor ini mengalami penurunan.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat kurun waktu 2012 – 2023 sebesar 3.86 persen yang dapat dikategorikan tingkat pertumbuhan yang belum berkualitas atau pertumbuhan ekonomi yang lambat/rendah. Dengan kondisi demikian, pertumbuhan ekonomi belum mampu menggerakkan variabel lain menuju lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang ideal dan berkualitas apabila mampu mencapai 6 -7 persen setiap tahun. Pada kondisi tersebut, aktivitas ekonomi berjalan dengan baik, kesempatan kerja terbuka sehingga Angkatan kerja dapat tertampung semua pada lapangan kerja, kemiskinan menurun, ketimpangan pendapatan semakin mengecil dan masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

### **Tingkat Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu variabel ekonomi yang memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi. Inflasi akan berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum baik konsumen, produsen, orang yang kaya, yang berpendapatan tetap, terlebih orang yang tergolong miskin. Oleh karenanya, pemerintah dengan segala kebijakannya, terus berupaya untuk mempertahankan keadaan inflasi pada kondisi yang normal atau moderat yang berkisar antara 7 – 10 persen.

Laju inflasi di Nusa Tenggara Barat yaitu tingkat perubahan harga produk dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) mengalami dinamika yang berfluktuatif yaitu pada tahun-tahun tertentu sangat tinggi dan sangat rendah dibanding dengan tahun-tahun yang lainnya. Pergerakan yang berfluktuatif tersebut juga berdampak pada kinerja variabel-variabel ekonomi yang lainnya. Dinamika inflasi yang terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2012 – 2023 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2. Dinamika Keadaan Inflasi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012-2023 (%)

Inflasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan keadaan yang tidak konsisten atau dinamis, artinya terjadi gap yang cukup tinggi terutama pada tahun 2013 dan 2022. Pada tahun 2013, inflasi cenderung tinggi hampir mencapai 10 % yang merupakan batas ambang maksimal inflasi berada dalam katagori normal. Pada saat tersebut, tentunya harga barang secara umum mengalami kenaikan sehingga memicu perekonomian berada dalam keadaan tidak stabil. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2013 tidak dapat mencegah terjadinya inflasi. Harga-harga komoditi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terus mengalami kenaikan, sehingga daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis barang yang dibutuhkan mengalami penurunan. Laju inflasi pada tahun 2014 hingga tahun 2021 secara perlahan mengalami penurunan dan berada pada kondisi yang stabil dari tahun 2015 – 2018 dan mengalami penurunan (kontraksi) hingga mencapai 0,60 persen pada tahun 2020. Keadaan yang stabil ini akan berdampak pula pada perbaikan kinerja variable ekonomi lainnya terutama pertumbuhan ekonomi sebagai indicator kinerja pembangunan ekonomi sebuah negara atau wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Namun pada tahun 2020, tahun puncak terjadinya pandemi Covid-19, laju inflasi di provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai titik terendah. Laju inflasi pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 2,12 persen bahkan terus meningkat menjadi 6,23 persen pada tahun 2022. Peningkatan nilai inflasi pada tahun 2021 berada dalam kondisi yang normal, karena masyarakat sudah leluasa meski dibatasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup maupun melakukan aktivitas bekerja.

Laju inflasi tahun 2022 sebesar 6,23 persen jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan 3 persen dan juga lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 5,51 persen. Inflasi terjadi diakibatkan oleh naiknya harga secara umum terjadi pada semua sektor ekonomi. Kenaikan harga kebutuhan masyarakat ini tidak terbentung mengalami kenaikan harga terutama kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 6,62 persen. Kenaikan harga ini berdampak pada daya beli masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhannya akan mengalami penurunan, terutama yang dirasakan oleh penduduk-penduduk miskin. Laju inflasi tahun 2023 mencapai besaran 3,02 persen mengalami penurunan 3,21 persen dibanding tahun 2022. Penurunan angka inflasi ini selain disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah menangani inflasi, juga disebabkan oleh meningkatnya harga beberapa kebutuhan pokok terutama bahan makanan, minuman, tembakau dan harga-harga barang lainnya. Kenaikan harga barang atau inflasi ini masih berada dalam katagori normal, sehingga perekonomian masih relative stabil meskipun memberi dampak terhadap variabel-variabelnya.

Secara rata-rata inflasi yang terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2012 – 2023 adalah sebesar 3,95 persen dan masih berada dalam indicator ringan atau normal. Dengan demikian, kondisi infasi yang terjadi merupakan *inflasi inersial* yaitu inflasi yang dapat diperkirakan untuk dipergunakan untuk mengadakan kontrak jangka panjang dalam kegiatan perekonomian (Murni, 2013). Inflasi yang stabil menyebabkan roda perekonomian berjalan dengan baik, kesempatan kerja terus terisi dan pengangguran juga tetap terjaga yaitu tidak terjadi peningkatan yang berarti.

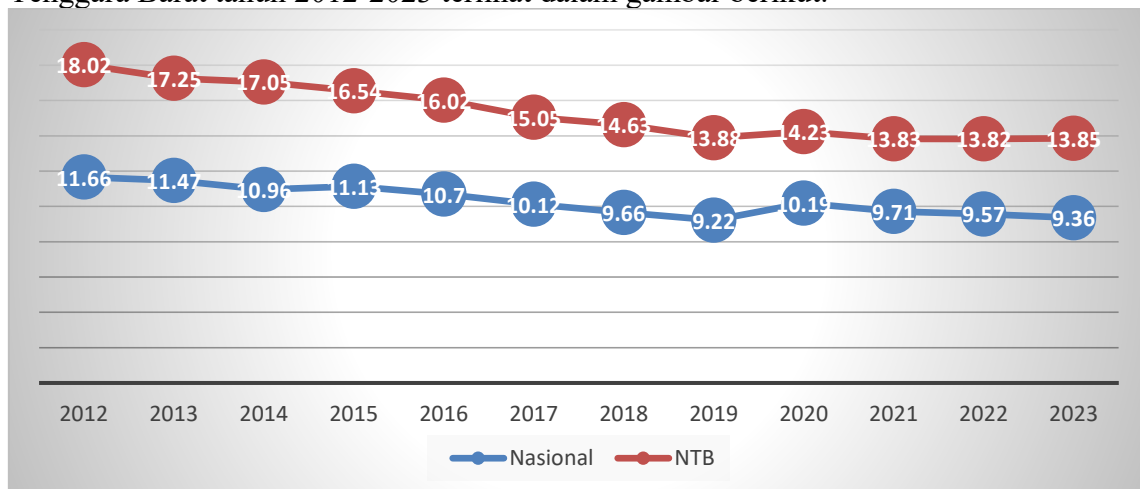
#### Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari berbagai indicator, namun dalam analisis ini hanya dibatasi pada dua indicator yaitu tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Kedua indicator ini memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan juga akan memberikan pengaruh terhadap kinerja variabel-variabel ekonomi yang lainnya seperti pertumbuhan ekonomi.

#### Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi problema yang dihadapi oleh setiap pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kemiskinsn berkaitan dengan status dan harkat martabat manusia, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk menguranginya jika tidak dapat dihilangkan. Disadari bahwa banyak dampak ekonomi dan non ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh kemiskinan, sehingga pemerintah berupaya untuk melakukan berbagai kebijakan yang memihak kepada kemiskinan.

Kondisi kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami dinamika yang cenderung menurun baik secara mutlak maupun persentase. Selama tahun 2012-2023 pergerakannya terkadang lebih cepat dibandingkan dengan pergerakan secara nasional bahkan sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya kemiskinan tidak hanya ada keterlibatan langsung dari pemerintah namun juga karena kondisi riel yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Persentase penduduk miskin di provinsi Nusa Tenggara Barat setiap tahunnya mengalami penurunan, terkecuali pada tahun-tahun tertentu mengalami kenaikan. Besar kecilnya persentase penduduk miskin dan perubahannya bervariasi, ada yang terjadi perubahan yang besar dan juga ada yang sedikit. Semakin menurunnya persentase kemiskinan menunjukkan terjadinya perbaikan kehidupan masyarakat yang diindikasikan bahwa pengeluarannya telah mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian kesejahteraanpun secara relatif dapat dirasakan oleh masyarakat. Persentase penduduk miskin di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012-2023 terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 3. Dinamika Persentase Kemiskinan Nasional dan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012- 2023 (September % )

Pergerakan persentase kemiskinan secara konsisten terus menurun hingga tahun 2019, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2020 dan kembali menurun pada tahun 2021, meskin sedikit menaik lagi pada 2022. dan turun tahun 2023. Berfluktuatifnya persentase kemiskinan pada tahun 2020- 2022 karena pada tahun-tahun tersebut terjadi gejolak ekonomi dan non ekonomi yang melanda dunia hingga local. Khusus pada tahun 2018 terjadi peristiwa alam di Nusa Tenggara Barat berupa gempa bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan kehidupan masyarakat terutama kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang mengalami penurunan. Tahun 2020 merupakan tahun puncak terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya krisis di berbagai sektor ekonomi. Dunia dilanda krisis ekonomi akibat tidak berjalannya aktivitas ekonomi secara normal yang menyebabkan aliran permintaan dan penawaran barang mengalami gangguan. Hal ini memicu terjadinya ketidakstabilan berbagai variabel ekonomi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kemiskinan. Persentase kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun ini mengalami peningkatan membawa dampak terhadap kinerja variabel ekonomi lainnya.

Persentase kemiskinan provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 sebesar 3,85 persen (kondisi Maret 2023) karena pada tahun ini tidak dilakukan survei kemiskinan untuk bulan September. Meskipun rentang waktu September 2022 -Maret 2023 hanya bulan, namun dalam rentang waktu tersebut menunjukkan aktivitas penduduk mengalami peningkatan. Indikasi yang dipergunakan adalah pemenuhan kebutuhan yang melebihi garis kemiskinan yang otomatis akan mengurangi persentase penduduk miskin. Penurunan penduduk miskin mencerminkan kesejahteraan penduduk karena telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan pokok.

Persentase kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012 – 2023 secara rata- rata sebesar 15,35 persen masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang mencapai 10.31 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menurunkan penduduk miskin telah memberikan hasil yang menggembirakan di tengah gejolak ekonomi global, nasional maupun local yang tentunya berimbas pada kestabilan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan suatu keberhasilan karena pada saat yang sama tingkat kesejahteraan meningkat. Melalui ikhtiar dan kesempatan yang ada untuk mencari nafkah kehidupan, penduduk dapat memperoleh hasil kerjanya baik berupa penghasilan maupun upah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan keadaan yang dinamis, artinya dari tahun ke tahun mengalami pergerakan yang positif yaitu selalu meningkat dengan perubahan yang bervariasi. Keadaan tersebut memberikan indikasi bahwa selama periode analisis telah terjadi proses pembangunan manusia yang berkesinambungan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil pencapaian pembangunan manusia tercermin dari dinamika IPM menunjukkan bahwa sumber daya manusia provinsi Nusa Tenggara Barat selama 12 tahun terakhir telah terjadi perbaikan menuju kemajuan dan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat telah merasakan secara langsung berbagai kebijakan pemerintah berkenaan dengan mengikat harkat dan martabat manusia yang

bermutu dan berkualitas. Keberhasilan membangun sumber daya manusia dengan berpatokan pada IPM dikatakan berhasil atau tidak berhasil bila terjadi perubahan pencapaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Indikator tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Indikator Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Interval	Kriteia
1	$< 60$	Rendah
2	$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
3	$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
4	$\geq 80$	Sangat Tinggi

Sumber : Tambunan (2022)

Berdasarkan kriteria ini dapat diketahui posisi IPM provinsi Nusa Tenggara Barat maupun nasional selama tahun 2012 – 2023 seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Kondisi IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional berdasarkan Kriteria Pencapaian tahun 2012-2023

Tahun	NTB	Kriteria	Nasional	Kriteria
2012	62.98	Sedang	67.7	Sedang
2013	63.76	Sedang	68.31	Sedang
2014	64.31	Sedang	68.9	Sedang
2015	65.19	Sedang	69.55	Sedang
2016	65.81	Sedang	70.18	Tinggi
2017	66.58	Sedang	70.81	Tinggi
2018	67.3	Sedang	71.39	Tinggi
2019	68.14	Sedang	71.92	Tinggi
2020	70.46	Tinggi	72.81	Tinggi
2021	70.86	Tinggi	73.16	Tinggi
2022	71.65	Tinggi	73.77	Tinggi
2023	72.37	Tinggi	74.39	Tinggi
Rata-rata	67.45	Sedang	71.07	Tinggi

Sumber : Data sekunder Diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas proses pembangunan manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat selama 11 tahun (2012-2019) berada dalam kondisi yang statis yaitu berada pada katagori “**Sedang**” sementara tahun 2020 -2023 berada dalam kriteria “**tinggi**” sedangkan secara nasional sejak tahun 2016 – 2023 berada dalam katagori “**Tinggi**”. Meningkatkan kualitas hidup manusia supaya berada pada jenjang yang tinggi terus dilakukan dan diikhtiarkan untuk dicapai. Berbagai kebijakan

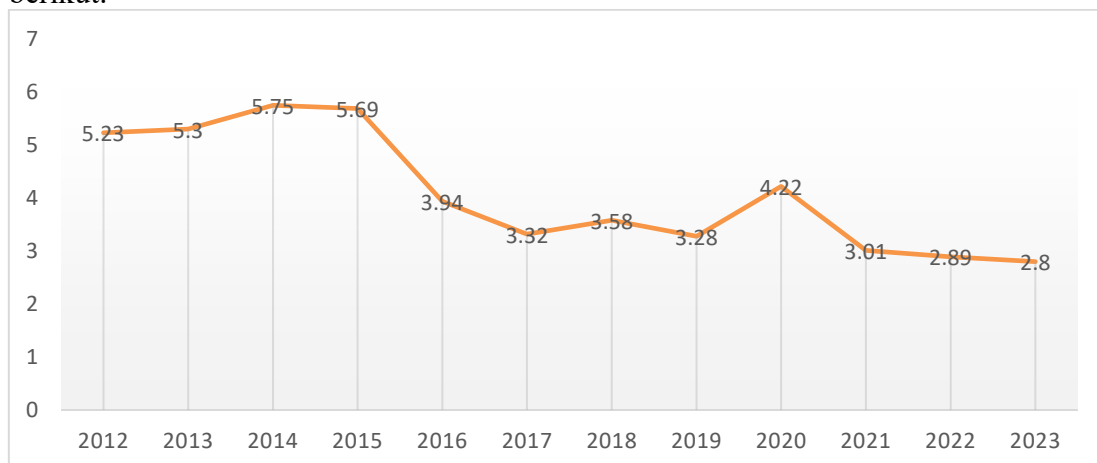
yang berkenaan dengan pembangunan manusia terus dilakukan, mulai dari variabel-variabel ekonomi makro maupun mikro dan sosial terus dilakukan perbaikan.

Namun secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2012-2023 berada pada kriteria **"Sedang"**. Hal ini menunjukkan bahwa meski terjadi peningkatan IPM dari tahun ke tahun namun masih belum mampu mencapai kriteria tinggi. Oleh karenanya pemerintah masih harus bekerja keras untuk mempercepat perubahan IPM dari tahun ke tahun dengan menggelontorkan paket-paket kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat secara luas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah dicapai oleh provinsi Nusa Tenggara Barat telah menghantar daerah ini berada pada level yang mengalami perubahan yang cepat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Hal ini bermakna bahwa pembangunan manusia di provinsi Nusa Tenggara Barat berjalan dengan baik dan telah memenuhi harapan dari sasaran dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, belum mampu sepenuhnya bergerak lebih cepat dibanding provinsi-provinsi lain yang memiliki peringkat yang lebih tinggi.

### Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi dan sosial yang berdampak luas terhadap tatanan kehidupan. Karena besar dampak yang dilakukan maka pengangguran merupakan masalah yang serius dihadapi oleh pemerintah dan harus dicari jalan pemecahannya. Dinamika pengangguran di provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2012 – 2023 dapat dilihat dari jumlah penduduk yang menganggur yaitu bagian dari Angkatan kerja yang tidak melakukan pekerjaan. Banyak faktor yang menyebabkan mereka menjadi penganggur, baik disebabkan secara sukarela, yang bersifat struktural, siklikal maupun musiman, Terjadinya pengangguran ini akan menjadi pemicu gejala kinerja variabel ekonomi yang lainnya, terutama berkenaan dengan aktivitas konsumsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup dalam jangka pendek. Dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat selama tahun 2012 – 2023 terlihat berikut.



Gambar 4 Dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012- 2023 (%)

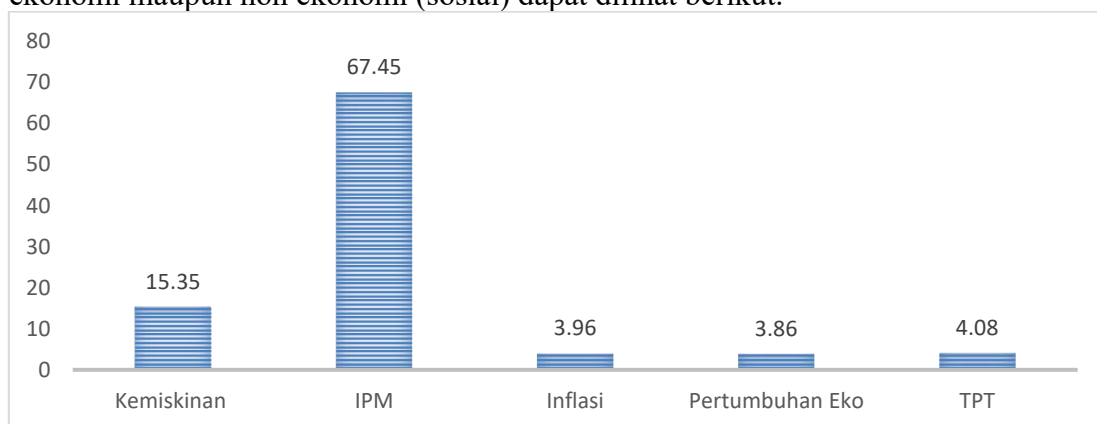
Dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2012- 2015 mengalami pergerakan yang relative sama pada tingkat 5 – 5,8 persen yang bermakna pada periode tersebut meskipun terjadi penambahan Angkatan kerja dan terbukanya kesempatan kerja, tetapi hanya menampung penduduk usia kerja relative sedikit. Jumlah penduduk yang bekerja semakin bertambah dan menempati porsi yang besar terhadap Angkatan kerja. Sementara sisi lain jumlah penduduk yang menganggur mengalami

pertambahan yang berfluktuatif dengan jumlah masih berada di atas ratusan ribu. Dalam posisi ini, TPT masih dapat dikategorikan relatif tinggi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2016–2019 terjadi penurunan yang signifikan pada kisaran 3 – 3,9 persen. Hal ini bermakna bahwa pada periode tersebut meskipun Angkatan Kerja berubah namun lebih banyak yang memperoleh pekerjaan, Angkatan kerja yang berubah setiap tahun (naik dan turun) menyebabkan jumlah penduduk yang bekerja mengalami perubahan (naik dan turun) diikuti oleh jumlah penduduk yang menganggur mengalami perubahan yang naik dan turun pula. Jumlah penduduk yang menganggur pada periode ini berada di bawah ratusan ribu orang, artinya lebih sedikit dibanding dengan periode sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode tahun 2020–2023 semakin menunjukkan kondisi yang menggembirakan karena berada pada kisaran 2 – 4,8 persen. Pada tahun ini terjadinya krisis perekonomian, krisis politik dan juga krisis Kesehatan yang merambah pula pada perekonomian nasional dan wilayah provinsi, kabupaten/kota. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang diakibatkan oleh krisis pandemi Covid-19. Tahun 2021 mengalami penurunan hingga terus mengalami pada tahun 2023 yang mencapai 2.80 persen sekaligus merupakan yang paling rendah selama periode 2012-2023. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 sangat menggembirakan karena pemerintah telah mampu mengukir sejarah pencapaian TPT yang paling rendah selama periode 2012 -2023. Angkatan kerja yang semakin bertambah diikuti oleh terbukanya kesempatan kerja baik yang disediakan oleh lembaga-lembaga yang menyediakan kesempatan kerja atau melakukan usaha secara mandiri.

Dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terjadi penurunan sebesar 2,46 persen dengan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama tahun 2012- 2023 sebesar 4.01 persen dan berada dalam kategori yang masih normal. Namun demikian pengangguran masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi perekonomian Nusa Tenggara Barat. Pengangguran berdampak pada dimensi sosial ekonomi, yang berpengaruh luas pada kestabilan dan ketentraman sosial. Meskipun secara ekonomi penduduk telah mencapai kesejahteraan yang ditunjukkan oleh berbagai indikator ekonomi, namun kesejahteraan sosial belum dapat dinikmati secara utuh karena masih adanya berbagai peristiwa sosial yang menyertai kehidupan seperti kriminalitas, ketidakadilan dan lainnya.

Kesejahteraan yang mampu dihasilkan oleh kinerja pemerintah dari berbagai indikator ekonomi maupun non ekonomi (sosial) dapat dilihat berikut.



Gambar 5. Rata-rata Indikator Kesejahteraan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012- 2023

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui rata-rata indikator kesejahteraan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012- 2023. Kemiskinan secara rata-rata sebesar 15,35 persen

yang masih berada pada katagori tinggi, artinya selama 12 tahun ini jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih tergolong tinggi meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menempatkan provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi yang tergolong miskin di Indonesia. Kondisi yang masih menjadi perhatian pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengatasinya dengan berbagai kebijakan yang berpihak kepada orang miskin (*pro poor*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan indeks pembangunan manusia rata-rata sebesar 67,45 yang berada dalam katagori “**sedang**”. Pembangunan manusia yang telah berlangsung di Nusa Tenggara Barat menunjukkan dimanika yang menggembirakan karena kualitas kehidupannya secara bertahap mengalami peningkatan meskipun masih berada dalam katagori sedang. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai terobosan kebijakan dalam pembangunan manusia terutama modal manusia berupa pendidikan dan Kesehatan. Dua moda dasar ini telah memberikan hasil yang menggembirakan meskipun belum maksimal, yang tentunya harus ditopang oleh ketersediaan modal ekonomi. Dilihat dari indicator ini, kesejahteraan belum mencapai seperti yang diharapkan.

Inflasi merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga keberadaannya sangat diperhatikan dan dipantau terus oleh pemerintah. Rata-rata inflasi yang terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012 – 2023 adalah sebesar 3,96 persen dan berada dalam katagori “**ringan**”. Inflasi terjadi selain mempengaruhi daya beli masyarakat juga berimbas pada menurunnya keuntungan yang diperoleh pengusaha sehingga berimbas pada penurunan upah pekerja bahkan cenderung terjadi pemutusan hubungan kerja, yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Tinggi rendahnya pertumbuhan dipastikan akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi dan pola hidup masyarakat. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012- 2023 sebesar 3,06 persen. Angka ini dapat digolongkan rendah/lambat dan tidak berkualitas. Artinya, penduduk belum merasakan secara penuh dampak pembangunan, dan belum terlibat secara langsung dalam aktivitas pembangunan. Penduduk masih berkutat dengan pencahariaan atau lapangan pekerjaan sekarang yang belum mampu merubah kualitas kehidupannya menuju kehidupan yang sejahtera. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara jumlah orang yang menganggur terhadap angkatan kerja merupakan kondisi yang juga membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan penduduk Nusa Tenggara Barat. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat tahun 2012 -2023 sebesar 4,01 persen, yang berarti setiap tahun terdapat sekitar 4 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja. Meskipun kondisi ini masih tergolong rendah, namun tetap akan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karenanya, sebagaimana variabel-variabel lainnya, TPT akan menentukan kualitas kehidupan masyarakat yang tentunya akan berdampak terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat dilihat dari beberapa indicator selama priode 2012- 2023 mengalami dinamika yang berfluktuatif dari tahun

ke tahun. Berdasarkan rata-rata variable baik dalam Indikator kesejahteraan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat, menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam perekonomian masih berada dalam kondisi yang relative terbatas. Hal ini dapat dilihat dari indicator berikut : (1) Indikator kesejahteraan ekonomi menunjukkan bahwa variable pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 3,86 persen dengan kriteria lambat atau rendah. Sedangkan variable inflasi rata-rata sebesar 3,96 persen berada pada katagori ringan; (2) Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa variable kemiskinan rata-rata sebesar 15,35 persen masih tergolong tinggi. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata sebesar 67,45 berada pada katagori sedang. Sementara variable Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rata-rata sebesar 4,08 persen berada dalam katagori rendah.

#### Saran

Mengacu pada simpulan di atas, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun masyarakat yaitu : Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah kebijakan dengan memberikan peran yang besar kepada masyarakat untuk bersama-sama berikhtiar mewujudkan kesejahteraan. Membuka ruang bagi para investor untuk melakukan investasi pada sector ekonomi dan social. Investasi akan mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas kehidupannya yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda NTB. (2021a). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020*.
- Bappeda NTB. (2021b). *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023*.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Rajagrafindo Persada.
- Defianti, L., Aimon, H., & Anis, A. (2021). Pengaruh Infrastruktur, Indek Pembangunan Manuia dan Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i1.13513>
- Firmansyah, M., Sahri, Irwan, M., & Maryam, S. (2024). Perubahan Struktur Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2).
- Irwan, M., Salmah, E., & Maryam, S. (2022). *Pengantar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif*. Mataram University Press.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar ekonomika pembangunan* (5th ed.). UPP STIM.
- Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. UPP STIM.
- Murni, A. (2013). *Ekonomika Makro Edisi Revisi*. PT. Revika Aditama.
- Pangiuk, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(2), 44. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160>
- Prisciawati, H. (2023). Modal Sosial Dan Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 12(1).
- Pulakian, O. G., Naukoko, Amran. T., & Londa, Albert. T. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(104).
- Rinaldi, N., Erfit, E., & Rosmeli, R. (2022). Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(3), 117–126. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i3.19>

- Shobri, H., Hasibuan, K. S., Nasution, M. D., & Nasution, J. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (LPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Sumatera Utara. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v4i2.12807>
- Sitepu, R. K. K., Az-Zahra, N. R., Jahiduddin, M. F., Putri, S. A., Fitri, K. N., & Rivtryana, D. A. (2024). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Indonesia: Analisis Input-Output Dampak Pengangguran terhadap Kesempatan Kerja. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1107–1117.
- Soleh, A. (2017). Masalah Ketenaga Kerjaan dan Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(2), 83–92.
- Subandi. (2019). *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2013). *Mikroekonomi teori pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(1), 75–83. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.198>
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu.
- Sun'an, M., & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Mitra Wacana Media.
- Tambunan, T. (2022). *Perekonomian Indonesia Di Era Jokowi*. Kencana.